LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang tidak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan kurunia-Nya kepada kami sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktunya.

Laporan Kinerja (LKjIP) pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan dasar penyusunan pelaporan kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga SKPD harus menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) instansi pemerintah yang didalamnya berisi mengenai program-program utama yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar (BKPSDM) tahun 2018 merupakan salah satu bahan dan dasar penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar ini masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, saran, dan tanggapan semua pihak terkait *(stake holders)* guna untuk perbaikan-perbaikan dimasa akan datang. Kami akan tetap berupaya keras untuk dapat menyusun dan menyajikan data-data di LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar ini dengan optimal dan tepat waktu.

Bangkinang, Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAMPAR

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ZULFAHMI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199203 1 008s

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR DIAGRAM vi
IKHTISAR EKSEKUTIF vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Gambaran Umum 1
B. Telahaan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3
C. Tugas Pokok dan Fungsi 7
D. Landasan Hukum..... 6
E. Susunan Kepegawaian 11
F. Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar..... 15
G. Maksud dan Tujuan LKjIP..... 16
H. Sistematika Pembahasan 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21
A. Rencana Strategis..... 21
B. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33
A. Capaian Kinerja Organisasi 33
B. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 37
C. Analisa Keuangan 55

BAB IV PENUTUP..... 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar..... 12

Gambar 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2019 17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tugas Pokok Fungsi BKPSDM Kabupaten Kampar Terkait Visi dan Misi Bupati Kampar Dalam RPJM	6
Tabel 1.2	PNS Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 1.3	PNS Berdasarkan Jabatan.....	13
Tabel 1.4	Jumlah PNS YangMengikutiDiklat/Bimtek Tahun 2019 ..	14
Tabel 1.5	Inventaris Tahun 2019	14
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Kampar	22
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019.....	26
Tabel 2.3	Program BKPSDM Tahun 2019	27
Tabel 2.4	Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kampar Terkait Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM dalam Kebijakan Strategis RPJMD. 2017-2022	28
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja	38
Tabel 3.2	Pengukuran Indikator Kinerja Utama TA. 2019	51
Tabel 3.5	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 2 Misi I	52
Tabel 3.7	Pencapaian Misi I Sasaran 3 Berdasarkan Target Renstra	53
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 3 Misi I	54
Tabel 3.12	Ihktisar Laporan Realisasi Keuangan BKPSDM Kab. Kampar Tahun 2019.....	55
Tabel 3.13	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2019 BKPSDM Kab. Kampar	56

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Mekanisme Pengukuran Kinerja 34

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2019 merupakan tahun kedua dari pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kampar periode 2017 -2022 dengan mengusung visi **"Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera".**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar mempunyai kedudukan sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai mana diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.

Capaian kinerja kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar untuk Tahun 2018 dalam upaya mendukung visi dan misi pembangunan daerah tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kampar 2017-2022 secara fisik untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari belanja langsung teralisasi sebesar 99,68% dengan realisasi keuangan sebesar 85,16%, hal tersebut dikarenakan ada kegiatan yang realisasinya mencapai 100% dan ada beberapa kegiatan tingkat pencapaiannya dibawah 100%. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada gambaran capaian kinerja sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai berikut :

Misi I : Menyiapkan SDM Yang Handal dan Profesional

Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Rata-rata capaian indikator kinerja dari Misi I, Tujuan 2 dan sasaran 1.1 mencapai 16,93% dari jumlah PNS tahun 2019 telah mengikuti peningkatan kompetensi formal dan non formal.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan kepegawaian

Rata-rata capaian indikator kinerja berupa indeks kepuasan pelayanan kepegawaian dari Misi I Tujuan 2 dan sasaran 2 termasuk dalam kriteria baik (76,83) atau dengan peringkat B.

Selanjutnya berdasarkan analisa keuangan realisasi belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2019 sebesar Rp **9.911.667.963,00** atau **56,68%** dari rencana anggaran belanja sebesar Rp. **17.487.312.924,00**.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar telah dapat mengoptimalkan penggunaan dana Tahun 2019, realisasi belanja langsung (belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal) sebesar Rp. 6.106.099.951,00 atau 85,16% dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.169.889.292,00 sehingga terdapat efisensi anggaran sebesar Rp.

1.063.789.341,00 atau 14,84%, sedangkan uang yang telah disetor pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 221.666.586,00 merupakan UYHD Tahun 2019.

Bangkinang, Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAMPAR

ZULFAHMI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199203 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar pada awalnya bernama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah 06 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2012 Tanggal 2 Oktober 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar. Pada Tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kampar 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam

melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik *(good governance),* dan pemerintah yang bersih *(clean government)* sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN, serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan yang didasarkan berpedoman pada penyusunan perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengunaan anggaran sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Perjanjian Kinerja serta visi dan misi Kepala Daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Nasional.

Pasal 4 Bab. IV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Visi Misi Bupati Kabupaten Kampar yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dimana **VISI** Bupati terpilih adalah " **Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Indusri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera"**

Mewujudkan Visi Pembagunan Daerah periode 2017-2022 tersebut, maka **ditetapkan** 6 (enam) **MISI** sebagai berikut:

1. **Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional**

   Penyiapan Sumber Daya Manusia diantaranya dilakukan pada calon angkatan kerja baik saat masih menyenyam dunia pendidikan sampai pada tahap menjadi pencari kerja. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusiayang tidak hanya dapat bersaing di dunia usaha, namun juga dapat terintegrasi dengan kebutuhan daerah melalui visi misi yang diarahkan oleh kepala daerah.

2. **Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

   Pengembangan pertanian yang modern adalah mengembangkan seluruh aktifitas pertanian dari hulu sampai hilir, melalui penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Selain itu upaya pengembangan pertanian juga berupa kemudahan akses kebutuhan pertanian (modal,sarana,prasarana) bagi petani sertamemberi nilai tambah dari proses penghasilan yang diperolehnya.

3. **Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proposional**

   Pembangunan infrastruktur di kabupaten Kampar utamanya diupayakan dalam menjawab permasalahan aksesibilitas dalam menunjang aktifitasdan mobilitas masyaraka, serta dalam mengembangkan kawasan pemukiman yang nyaman dan memadai.

4. **Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif**

   Terciptanya iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat dalam pengembangan ekonomi,khusus dunia usaha. Besarnya peluang untuk melakukan investasi di kabupaten Kampar akan menjadi kurang

bermakna jika tidak di tunjang oleh regulasi dan program yang juga fokus dalam pengembangan investasi.

5. **Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan indusri Pengolahan yang maju**

   Saat ini Kabupaten Kampar belum dapat menjaditujuan wisata bagi tidak hanya para wisatawan domestic namun juga para wisatawan local kabupaten Kampar sendiri. Padahal dari keberadaan objek wisata Kabupaten Kampar memiliki berbagai objek wisata baik dari wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan lainnya. Menjadikan Kabupaten Kampar menjadi tujuan wisata.

6. **Memperkuat Citra Kampar sebagai serambi Mekah yang Religius, Beradaat dan Berbudaya**

   Kabupaten Kampar memiliki sejarah dan budaya yang sangat kuat yang ditandai dengan peninggalan fisik seperti candi dan masjid yang telah berdiri ratusan tahun lalu. Kebanggaan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki seharusnya juga dapat mewujud pada kemajuan daerah.

Mencermati secara seksama pada Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kampar dengan 6 (enam) misi yang terkandung didalamnya bila disandingkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Kampar dapat di sandingkan dengan misi 1 dan misi ke 6 yang mana tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1.1

Tugas Pokok Fungsi BKPSDM Kabupaten Kampar terkait Visi dan Misi Bupati Kampar dalam RPJMD

Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sipil negara	Melaksanakan penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	Rekrutmen pegawai yang transparan, objektif, akuntabel, bebas KKN dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi ASN yang ditingkatkan
		Meningkatkan kompetensi ASN	
		Melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi	
	Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian Menegakkan aturan disiplin, kode etik dan kode prilaku pegawai	Membangun system informasi yang dapat mengukur dan menilai kinerja aparatur
			Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja
			Menerapkan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Kedudukan.

   Badan Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2. Fungsi

   a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
   c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
   d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.

D. LANDASAN HUKUM

LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan lembaran Negara Nomor 4315);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016nomor 114);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tanggal 2017 tentang RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019
22. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

1. Struktur Organisasi

Berikut ini ditampilkan gambar 1.1 tentang struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar

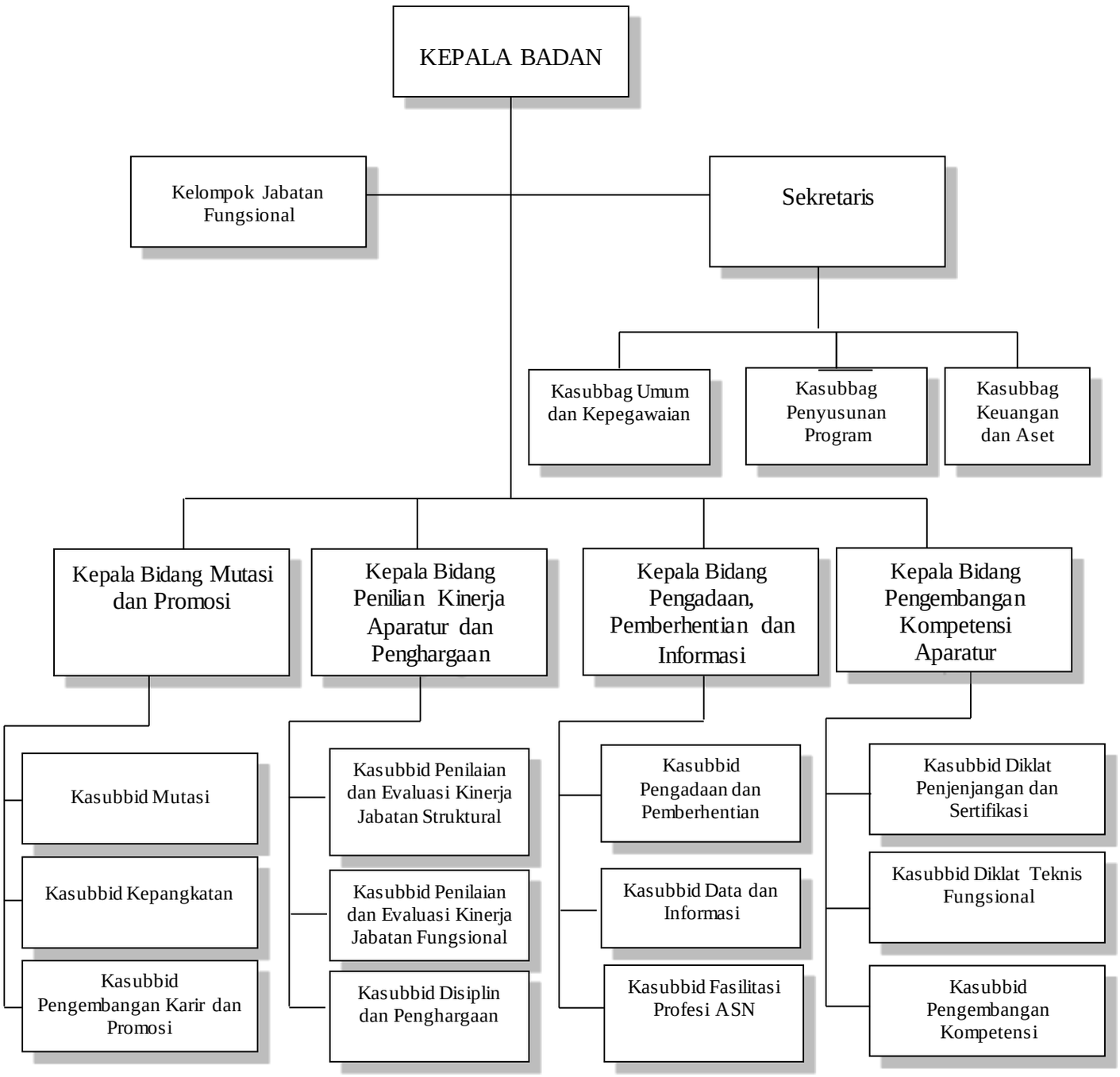

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Tahun Anggaran 2019, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Kabupaten Kampar didukung oleh pegawai sebanyak 55(lima puluh lima) Orang terdiri dari 45 (empat puluh lima) Pegawai Negeri Sipil, 6 (enam) orang Tenaga Harian Lepas, 3 (tiga) orang Petugas Kebersihan, 2(dua) orang Petugas Pengamanan kantor.

2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah.

2.1. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel 1.2
PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Pangkat/ Gol	SD	SLTP	SLTA	D2/D3	S1/D4	S2	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-	-	-	1	1
3	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	1	-	1
4	Penata Tk. I (III/d)	-	-	2	-	6	1	9
5	Penata (III/c)	-	-	-	1	5	1	7
6	Penata muda Tk. I (III/b)	-	-	2	1	6	-	9
7	Penata Muda (III/a)	-	-	-	1	6	-	7
8	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengatur (II/c)	-	2	5	1	-	-	8
10	Pengatur Muda (II/b)	-	-	1	-	-	-	1
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
12	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
13	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
14	Juru Muda Tk.I (I/b)	1	-	-	-	-	-	1
15	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**1**	**2**	**10**	**4**	**24**	**4**	**45**

2.2. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
PNS Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	**Pejabat Struktural:**	
	a. Esselon II.b – Kepala Badan	1 orang
	b. Esselon III.a – Sekretaris	1 orang
	c. Esselon III.b– Kepala Bidang	4 orang
	d. Esselon IV.a – Kepala Sub. Bagian/Kepala Sub Bidang	12 orang
	Jumlah pejabat structural	**18 orang**
2	Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian:	2 orang
3	Fungsional Umum	25 orang
	Jumlah Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum	**27 orang**
	Jumlah (1 s/d 3)	**45 orang**

2.3. BerdasarkanPendidikan dan Pelatihan(DIKLAT/BIMTEK) TA. 2019

Tabel 1.4
Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat/Bimtek Tahun 2019

No.	Jenis Diklat	Jumlah Peserta	Ket.
1.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar	1	
2.	Bimbingan Teknis Manajemen PNS sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 serta kebijakan dalam Penyelenggaraan Diklat Bagi Aparatur Sipil Negara	3	
3.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Keuangan (PP) Nomor 12 Tahun 2019	1	
4	Bimbingan Teknis Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (record Center)	3	

3. Susunan Inventaris.

Susunan Inventaris Tahun Anggaran 2019

Tabel 1.5
Inventaris Tahun 2019

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	UKURAN	NO. CHASIS/ MESIN	TAHUN PERO-LEHAN	KODE BARANG	KEADAAN BARANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Mini Bus	Innova Venturer	-	ITR-A705228	2019	02.02.01.02.003	Baik	BKPSDM
2	Kursi Tamu	Movin	-	-	2019	02.0502.01.031	Baik	BKPSDM
3	AC Split	Daikin	-	FTV25BXV14	2019	02.05.02.04.004	Baik	BKPSDM
4	AC Split	Daikin	-	FTV25BXV14	2019	02.05.02.04.004	Baik	BKPSDM
5	Sound System	Renegade	-	RPA-1503	2019	02.05.02.06.004	Baik	BKPSDM
6	PC Unit	HP	-	22-c005ld	2019	02.10.01.02.001	Baik	BKPSDM
7	Laptop	HP Spectre x360	-	13-AP005ATU	2019	02.10.01.02.002	Baik	BKPSDM
8	Printer	Epson LII0	-	B631C	2019	02.10.01.02.003	Baik	BKPSDM
9	Printer	Epson L3150	-	C634C	2019	02.10.01.02.003	Baik	BKPSDM
10	Scanner	Fujitsu	-	Scannap IXI500	2019	02.10.01.02.004	Baik	BKPSDM
11	Hard Disk	Seagate	-	NA9NA62F	2019	02.10.01.02.012	Baik	BKPSDM

Untuk daftar inventaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kampar sampai Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

F. Isu Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar

Berbagai persoalan kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini cukup memberi warna tersendiri, masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri ditengarai masih tidak kompeten dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik, PNS sudah terlalu banyak dan PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi jabatan yang diduduki, PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal, dan kinerjanya rendah. Hal itu merupakan perwujudan yang nampak sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas;
2. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dalam Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai belum merata;
3. Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagaian besar belum terlaksana dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan lokal;
4. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai;

5. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberbagai instansi pemerintah.

Isu-isu tersebut yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas, kompetensi yang mengarah pada peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur;
2. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan;
3. Masih rendahnya disiplin PNS;
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian dalam pelayanan administrasi maupun informasi.

G. Maksud dan Tujuan LKjIP

Dua fungsi utama LKjIP yang merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh Badan Kepegawaian dan Pengengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kampar Seperti Gambar 1.2. berikut :

Gambar I.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2019

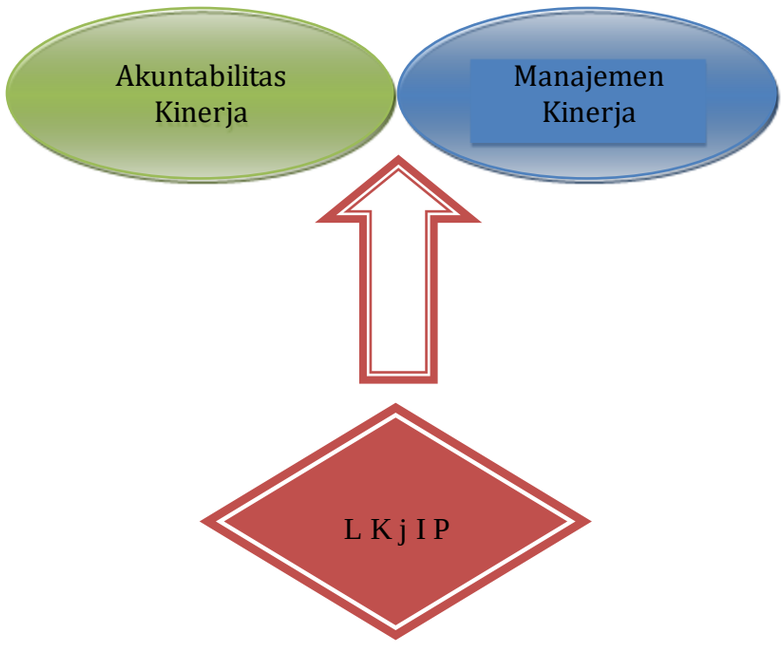

Maksud dan tujuan dari penyusunan dan penyampaian LKJIP Badan Kepegawaian dan Pengengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2019 adalah mencakup hal-hal berikut :

a. Maksud

1. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kampar untuk upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.
2. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kampar atas capaian kinerja yang berhasil dan belum berhasil selama Tahun Anggaran 2019 kepada atasan langsung.

b. Tujuan

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Kampar selaku Kepala Daerah Kabupaten Kampar sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian dan Pengengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

H. Sistimatika Pembahasan

Dalam laporan ini disajikan data-data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun 2019. Strategis dimaksudkan disini adalah kegiatan-kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kampar, dan disamping itu dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari Empat Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(stategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai baik tentang keberhasilan/kegagalan organisasi dan langkah strategis yang akan diambil di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran-lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kampar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layananan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	$Index\ kepuasan\ Pelayanan\ kepegawaian = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter}}{\text{Total Parameter Yang Terisi}}\ x\ Bobot$	4 (Sangat Baik) 100	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur sipil negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	$\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ ikut\ peningkatan\ kompetensi}{\text{Jumlah ASN Kabupaten Kampar}}\ x\ 100\%$
				Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang terlayani	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	$Index\ kepuasan\ Pelayanan\ kepegawaian = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter}}{\text{Total Parameter Yang Terisi}}\ x\ Bobot$

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kampar

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahunan
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sipil negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompentensi (formal dan non formal)	± 2% dari jumlah ASN Kabupaten Kampar
2	Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang terlayani	Indeks Kepuasan pelayanan kepegawaian	4 (Sangat Baik) 100

Sumber Data:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kab. Kampar Tahun 2019

1. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar TA. 2019

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan janji Kepala Badan kepada Bupati Kampar untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta perwujudan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2019, yang merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Kepala Badan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah/ tidak mencapai target.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, (tercantum pada lampiran I LKjIP TA. 2019), dokumen RENJA Tahun 2019 (tercantum pada lampiran II LKjIP TA. 2019), dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Melalui perjanjian kinerja, diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup Indikator (*Kinerja, Input, Output dan outcome)* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
b. Menciptakan tolokukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagaiberikut:

Tabel. 2.2

Perjanjian Kinerja BKPSDM

Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	5
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	± 2% dari Jumlah ASN Kabupaten Kampar
2	Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang terlayani	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	4 (Sangat Baik) 100

	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.385.547.640
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	284.052.000
3	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	46.038.700
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	64.490.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.210.000
6	Program Penyelenggaraan Agenda Pemerintah Daerah	45.980.300
7	Program Pendidikan Kedinasan	948.293.100
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.251.413.100
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.174.544.452

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas dilaksanakan melalui beberapa Program berikut :

Tabel 2.3
Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Pelayananan Administrasi Perkantoran	Rp	1.486.017.640,00	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	839.052.000,00	
3	Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	Rp	84.181.700,00	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	90.912.700,00	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp	32.210.000,00	
6	Program Penyelenggaraan Agenda Pemerintah Daerah	Rp	45.980.300,00	
7	Program Pendidikan Kedinasan	Rp	739.983.100,00	
8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	1.284.013.100,00	
9	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp	2.567.538.752,00	
Jumlah		Rp	7.169.889.292,00	

Tabel 2.4
Misi , Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kampar Terkait Tugas dan Fungsi BKPSDM
dalam kebijakan strategis RPJMD TA. 2017-2022

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program		Kegiatan	Anggaran(Rp)
Menyiapkan SDM Yang Handal dan Profesional	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layananan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	155.400.000
						2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	69.135.502
						3	Penyedaiaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	36.994.000
						4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	66.526.098
						5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.473.110
						6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.436.930
						7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	165.000.000
						8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000
						9	Penyediaan makanan dan minuman	146.882.000
						10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	620.900.000
						11	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	104.610.000

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program		Kegiatan	Anggaran(Rp)
						12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	65.700.000
			Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Program Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur	13	Pembangunan Gedung Kantor	90.000.000
						14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	465.000.000
						15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	51.992.000
						16	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	232.060.000
			Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	17	Pemindahan Tugas PNS	45.645.200
						18	Proses Pengusulan Pensiun	38.536.500
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	Program Peningkatan kapsitas Sumber Daya Aparatur	19	Pendidikan dan Pelatihan Formal	71.412.700
						20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.500.000
			Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.549.000
						22	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.586.400
						23	Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Keiatan	29.074.600

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program		Kegiatan	Anggaran(Rp)
			Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Program Penyelenggaraan Agenda Pemerintah	24	Konsolidasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah	45.980.300
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	Program Pendidikan Kedinasan	25	Peningkatan SDM Aparatur Dalam Ikatan Dinas	739.983.100
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	1.101.911.800
						27	Pembinaan Jiwa Korsa dan Penyelenggaraan Persemayaman/Pemakaman bagi Anggota KORPRI	182.101.300
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	Program Pembinan dan Pengembangan Aparatur	28	Penyusunan Rencana Karir PNS	294.129.000
						29	Seleksi Penerimaan Calon PNS	613.700.000
						30	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Displin PNS	70.025.600
						31	Updating dan Validasi Data Kepegwaian	98.584.300

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program		Kegiatan	Anggaran(Rp)
						32	Penyelengaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	113.173.900
						33	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Melalui Seleksi Terbuka	451.472.150
						34	Sumpah PNS	9.161.350
						35	Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian	19.506.750
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	Program Pembinan dan Pengembang an Aparatur	36	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	747.471.152
						37	Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG	10.477.900
						38	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan Struktural	40.687.850
						39	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan Fungsional	40.913.200
						40	Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	58.235.600
Jumlah Anggaran								**7.169.889.292**

B. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan Misi Kabupaten Kampar terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar diatas adalah:

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	Melaksanakan penerimaan Pegawai secara Transparan, Objektif, Akuntabel dan bebas KKN	Rekrutment pegawai yang Transparant, Objektif ,akuntabel, bebas KKN dan Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi ASN yang ditingkatkan
				Meningkatkan Kompetensi ASN	
				Melaksanakan Pengembangan pegawai berbasis Kompetensi	
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan kepegawaian	Membangun Sistem Informasi yang dapat mengukur dan menilai kinerja aparatur
				Menegakkan Aturan Displin, Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai	Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja
					Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, Organisasi, badan hukum dan pimpinan Internal, Exsternal secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar selaku pengemban amanah masyarakat dalam rangka melaksanakan kewajiban Instansi melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/ kegiatan, Misi dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup perjanjian indikator kinerja dan perjanjian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Mekanisme pengukuran kinerja yang perlu diprioritaskan, yaitu seperti diagram 3.1:

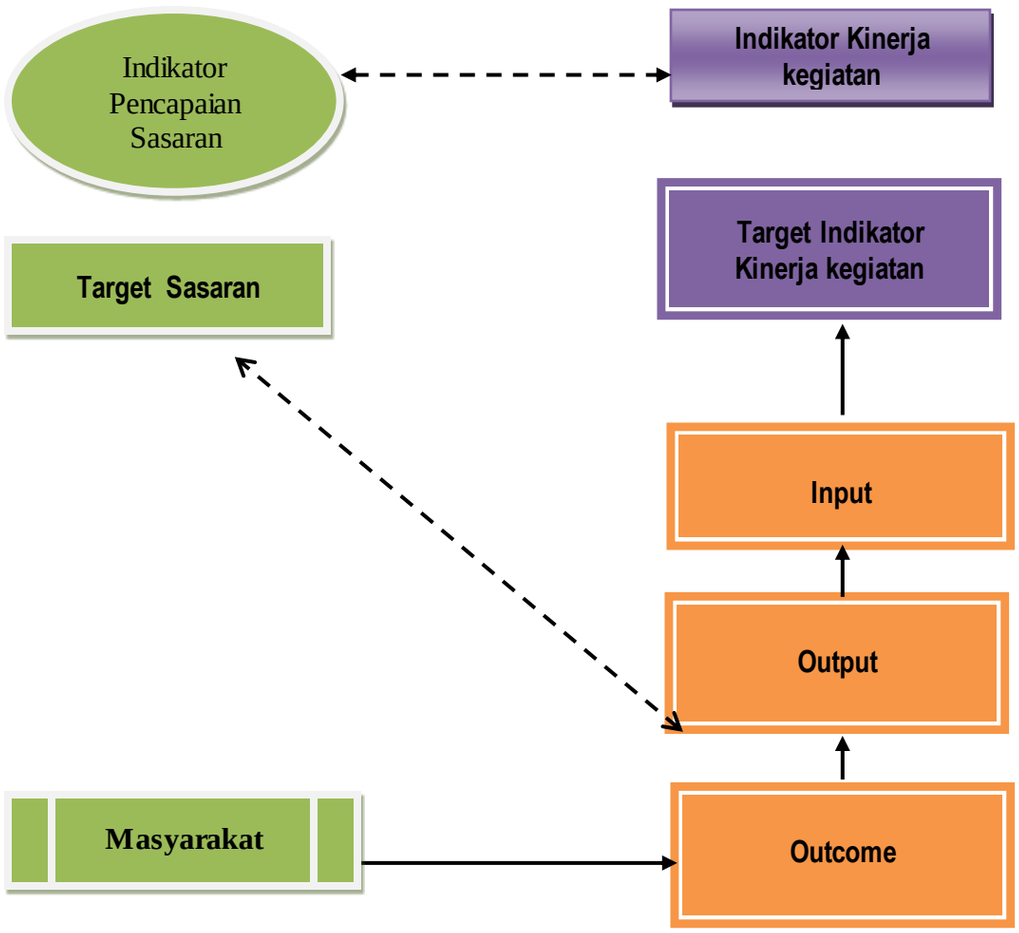

a. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar meliputi *Input, Output, dan Outcome*, Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Indikator kinerja Input yang digunakan bervariasi sesuai dengan masukan yang paling mempengaruhi terlaksananya kegiatan. Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai

dari suatu kegiatan, begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi tergantung dari *Output* yang dihasilkan. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dari penetapan tujuan dan sasaran.

Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu berupa indikator kinerja *Output* atau *Outcome*.

b. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas.

c. Sistem Penilaian Indikator Kinerja

Kriteria penilaian yang digunakan adalah kebenaran normatif, pada umumnya instansi pemerintah serta para akademisi setuju. Kesetujuan berbagai pihak ini karena :

- Petunjuk pelaksanaan evaluasi mendasarkan pada praktik-praktik terbaik administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan (manajemen) kinerja. Namun demikian tentulah, penetapan kriteria ini bukan konsensus nasional yang menjadi kitab pedoman, akan tetapi paling tidak MENPAN & RB sudah dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan mencari solusi perbaikan bersama-sama dengan pihak yang dievaluasi.

- Kriteria penilaian terhadap berbagai aspek dan komponen yang dinilai tersebut, telah mempertimbangkan biaya pengumpulan data.

Setelah proses pelaksanaan program/ kegiatan secara keseluruhan, mempedomani Buku Panduan evaluasi kinerja yang ditulis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, maka pengkategorian peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	**Sangat Memuaskan**
2	A	> 80 – 90	**Memuaskan,** Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	**Sangat Baik,** Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	**Baik,** Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	**Cukup (Memadai),** Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	**Kurang,** Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	**Sangat Kurang,** Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

B.1. Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2019

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara target dengan rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya, seperti tercantum dalam lampiran 3.1 berikut ini:

TABEL. 3.1
Pengukuran Kinerja TA. 2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**							
				1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kinerja	:	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telepon dan jaringan internet	bulan	12	12	100%
					Input	:	Dana yang tersedia	Rp.	155.400.000,00	110.730.886,00	71,26%
					Output	:	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telepon dan jaringan internet	bulan	12	12	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya airdan listrik	bulan	12	12	100%
				2 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kinerja	:	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	69.135.502,00	64.799.250,00	93,73%
					Output	:	Tersedianya penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12	12	100%
					Outcome	:	Terpeliharanya Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12	12	100%
				3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kinerja	:	Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	12	12	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	36.994.000,00	35.494.000,00	95,95%
					Output	:	Terpeliharanya peralatan kerja	bulan	12	12	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	12	12	100%
				4 Penyediaan Alat Tulis kantor	Kinerja	:	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	66.526.098,00	66.375.360,00	99,77%
					Output	:	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
				5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kinerja	:	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	45.473.110,00	45.427.425,00	99,90%
					Output	:	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya penyediaan barang ceatakan dan penggandaan	bulan	12	12	100%
				6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kinerja	:	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	5.436.930,00	5.426.000,00	99,80%
					Output	:	Tersedianya komponen intsalasi litrik/ penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya penyediaan komponen intsalasi litrik/ penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	100%
				7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kinerja	:	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	16	16	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	165.000.000,00	154.722.000,00	93,77%
					Output	:	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	16	16	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	16	16	100%
				8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kinerja	:	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan pearturan perundang-undangan	bulan	12	12	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	3.960.000,00	3.960.000,00	100%
					Output	:	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
					Outcome	:	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaaan dan pearturan perundang-undangan	bulan	12	12	100%
				9 Penyediaan makanan dan minuman	Kinerja	:	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	146.882.000,00	107.270.226,00	73,03%
					Output	:	Tersedianya Makan dan Minuman Rapat-rapat pegawai	bulan	12	12	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	100%
				10 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kinerja	:	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	12	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	620.900.000,00	510.023.021,00	82,14%
					Output	:	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	12	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	100%
				11 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Kinerja	:	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Harian	bulan	12	12	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	104.610.000,00	92.365.000,00	88,29%
					Output	:	Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas BKD Kab. Kampar	orang	7	7	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Tenaga Harian	bulan	12	12	100%
				12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kinerja	:	Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor	bulan	12	12	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	65.700.000,00	65.700.000,00	100%
					Output	:	Tersedianya Petugas Jasa	bulan	12	12	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
							Pengamanan Kantor				
					Outcome	:	Terpenuhinya penyediaan jasa pengamanan kantor	bulan	12	12	100%
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**							
				13 Pembangunan Gedung Kantor	Kinerja	:	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Paket	1	1	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	90.000.000,00	89.815.000,00	99,79%
					Output	:	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	1	1	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor BKPSDM	Paket	1	1	100%
				14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kinerja	:	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit	100%	1	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	465.000.000,00	431.000.000,00	92,69%
					Output	:	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Mobil Dinas	Unit	1	1	100%
					Outcome	:	Tersedianya Kenadaraan Dinas/ Operasional	Unit	1	1	100%
				15 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kinerja	:	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Unit	2	2	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	51.992.000,00	45.409.900,00	87,34%
					Output	:	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas BKPSDM Kampar	Unit	2	2	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	2	2	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
				16 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kinerja	:	Terlaksananya Rehabilitasi bangunan kantor	Paket	1	1	100%
					Input	:	Dana Tersedia	Rp.	232.060.000,00	222.540.900	95,90%
					Output	:	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Paket	1	1	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya Rehabilitasi Gedung Kantor	Paket	1	1	100%
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	**Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**							
				17 Pemindahan Tugas PNS	Kinerja	:	Terlaksananya Pemindahan Tugas PNS	PNS	500	744	149%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	45.645.200,00	43.278.700,00	94,82%
					Output	:	Terlaksananya Pemerataan ASN di Kabupaten Kampar	PNS	500	744	149%
					Outcome	:	Terpenuhinya Pemerataan ASN di Kabupaten Kampar	PNS	500	744	149%
				18 Proses Pengusulan Pensiun	Kinerja	:	Terlaksananya Proses Pengusulan Pensiun	PNS	400	439	110%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	38.536.500,00	35.359.200,00	91,76%
					Output	:	Terlaksananya Proses Pengurusan ASN yang Pensiun	PNS	400	439	110%
					Outcome	:	Terselesaikannya Proses Pengurusan Pensiun	PNS	400	439	110%
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**							
				19 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kinerja	:	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal	PNS	6	6	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	71.412.700,00	67.812.700,00	94,96%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
					Output	:	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Formal	PNS	6	6	100%
					Outcome	:	Meningkatnya Pengetahuan Pegawai	PNS	6	6	100%
				20 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja	:	Tercapainya pelaksanaan bimbingan teknis implementasi perundang-undangan bagi ASN pengelola keuangan daerah	orang	2	2	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	19.500.000,00	19.105.240,00	97,98%
					Output	:	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi perundang-undangan bagi ASN pengelola keuangan daerah	orang	2	2	100%
					Outcome	:	Aparatur Sipil Negara yang memahami regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	orang	2	2	100%
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**							
				21 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kinerja	:	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1	1	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	1.549.000,00	1.549.000,00	100%
					Output	:	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1	1	100%
					Outcome	:	Tersedianya dokumen laporan kinerja OPD yang tepat waktu dan Akuntabel	dokumen	1	1	100%
				22 Penyususnan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kinerja	:	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	1	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	1.586.400,00	1.586.400,00	100%
					Output	:	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang akurat	dokumen	1	1	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
					Outcome	:	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang akurat dan akuntabel	dokumen	1	1	100%
				23 Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Kinerja	:	Terlaksananya penyusunan program, monitoring dan evaluasi kegiatan	laporan	12	12	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	29.074.600,00	28.924.600,00	99,48%
					Output	:	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan BKPSDM Kab. Kampar	laporan	12	12	100%
					Outcome	:	Tersusunnya laporan Evaluasi program dan kegiatan	laporan	12	12	100%
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	**Program Penyelenggaraan Agenda Pemerintah Daerah**							
				24 Konsolidasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah	Kinerja	:	Terlaksananya konsolidasi penyelanggaraan kegiatan pemerintah	kali	1	1	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	45.980.300,00	45.980.300,00	100%
					Output	:	Terlaksananya Perayaan Hari Ulang Tahun Korpri Kab. Kampar	kali	1	1	100%
					Outcome	:	Upcara Hari Ulang Tahun KORPRI	kali	1	1	100%
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	**Program Pendidikan Kedinasan**							
				25 Peningkatan SDM Aparatur Dalam Ikatan Dinas	Kinerja	:	Terlaksananya Peningkatan SDM AparaturDalam Ikatan Dinas	orang	5	3	60%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	739.983.100,00	366.131.311,00	49,48%
					Output	:	Jumlah Pegawai yang menerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	orang	5	3	60%
					Outcome	:	Terpenuhinya Peningkatan SDM Aparatur dalam ikatan dinas	orang	5	3	60%
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sipil	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**							
				26 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS daerah	Kinerja	:	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS daerah	PNS	37	36	97%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
		Negara	(formal dan non formal)		Input	:	dana yang tersedia	Rp.	1.101.911.800,00	943.655.900,00	85,64%
					Output	:	Terpenuhinya pejabat yang mengikuti diklat PIM TK IV, TK. III dan TK. II	PNS	37	36	97%
					Outcome	:	Tercapainya Sumber Daya Aparatur yang Berkaulitas	PNS	37	36	97%
				27 Pembinaan Jiwa Korsa dan Penyelenggaraan Persemayaman / Pemakaman bagi Anggota Korpri	Kinerja	:	Terlaksananya Pembinaan Jiwa korsa dan penyelanggaraan persemayaman / pemakaman bagi anggota Korpri	kejadian	20	20	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	182.101.300,00	168.001.300,00	92,26%
					Output	:	Terselenggaranya Pesemayaman dan Pemakaman serta Jiwa Korsa Bagi Anggota Korpri di Kabupaten Kampar	kejadian	20	20	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya penyelenggaraan pemakaman dan persemayaman bagi anggota korpri	kejadian	20	20	100%
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	***Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur***							
				28 Penyusunan Rencana pembinaan karir PNS	Kinerja	:	Terlaksananya Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jabatan	760	759	99,87%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	294.129.000,00	282.733.000,00	96,13%
					Output	:	Terpenuhinya Penyusunan Pembinaan Karir PNS	Jabatan	760	759	99,87%
					Outcome	:	Terisinya Jabatan Struktural dilingkungan Pemda Kab. Kampar	Jabatan	760	759	99,87%
				29 Seleksi penerimaan calon PNS	Kinerja	:	Terlaksananya seleksi penerimaan calon PNS dan PPPK	CPNS/PPPK	284	284	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	613.700.000,00	548.122.103,00	89,31%
					Output	:	Terpenuhinya Penerimaan Calon PNS dan PPPK formasi Penyuluh Pertanian, Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga teknis	CPNS/PPPK	284	284	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
					Outcome	:	Terselesaikannya Penerimaan Calon PNS Formasi Penyuluh Pertanian, Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis	CPNS/PPPK	284	284	100%
				30 Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Kinerja	:	Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	kasus	40	40	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	70.025.600,00	66.575.600,00	95,07%
					Output	:	Terlaksananya Proses penganganan Kasus-kasus PNS	kasus	40	40	100%
					Outcome	:	Terselesaikannya Proses Penganganan Kasus-kasus PNS	kasus	40	40	100%
				31 Updating dan Validasi data kepegawaian	Kinerja	:	Terlaksananya updating dan validasi data kepegawaian	berkas	9550	9550	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	98.584.300,00	95.884.300,00	97,26%
					Output	:	Terlaksananya Updating dan Validasi data pegawai di Lingkungan Pemda Kampar	berkas	9550	9550	100%
					Outcome	:	Update dan Validasi Data PNS	berkas	9550	9550	100%
				32 Penyelanggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Bagi PNS Kab. Kampar	Kinerja	:	Terlaksananya penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	PNS	150	150	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	113.173.900,00	89.403.900,00	79,00%
					Output	:	Terlaksananya Proses penyelenggaraan ujian dinas dan penyesuaian ijazah bagi PNS Kab. Kampar	PNS	150	150	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya Persyaratan Kenaikan pangkat Naik Golongan dan Penyesuaian ijazah	PNS	150	150	100%
				33 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Melalui Seleksi Terbuka	Kinerja	:	Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karir melalui seleksi terbuka	Jabatan	8	17	212,50%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	451.472.150,00	338.876.327,00	75,06%
					Output	:	Terpilihnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan	8	17	212,50%
					Outcome	:	Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan	8	17	212,50%
				34 Sumpah PNS	Kinerja	:	Terlaksananya Sumpah PNS	PNS	250	250	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	9.161.350,00	9.161.350,00	100%
					Output	:	Terselenggaranya Sumpah PNS	PNS	250	250	100%
					Outcome	:	Terpenuhinya pelaksanaan sumpah PNS	PNS	250	250	100%
				35 Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian	Kinerja	:	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi teknis kepegawaian	PNS	130	130	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	19.506.750,00	16.706.750,00	85,65%
					Output	:	Terpenuhinya koordinasi teknis dan sosialisasi tentang kepangkatan, mutasi dan pensiun	PNS	130	130	100%
					Outcome	:	Meningkatanya Pengetahuan PNS Tentang kepangkatan, mutasi dan pensiun	PNS	130	130	100%
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	***Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur***							
				36 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Kinerja	:	Terlaksananya penataan sistem adminitrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	berkas	2200	2355	107%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	747.471.152,00	738.368.252,00	98,78%
					Output	:	Terlaksananya Pertimbangan kenaikan Pangkat tepat waktu	berkas	2200	2355	107%
					Outcome	:	Terselesaikannya Administrasi Kenaikan Pangkat tepat waktu	berkas	2200	2355	107%
				37 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah	Kinerja	:	Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Website	kegiatan	1	1	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	10.477.900,00	9.000.000,00	85,90%
					Output	:	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web	kegiatan	1	1	100%
					Outcome	:	Tersedianya Informasi Kepegawaian Yang Berbasis Web	kegiatan	1	1	100%
				38 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan Struktural	Kinerja	:	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur jabatan struktural	PNS	2403	2403	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	40.687.850,00	40.687.850,00	100%
					Output	:	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar	PNS	2403	2403	100%
					Outcome	:	Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar	PNS	2403	2403	100%
				39 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan Fungsional	Kinerja	:	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur jabatan fungsional	PNS	6213	6213	100%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	40.687.850,00	40.687.850,00	100%
					Output	:	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar	PNS	4500	6213	138%
					Outcome	:	Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar	PNS	4500	6213	138%
		Meningkatnya	Indeks	***Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur***							

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET/ SATUAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
		pelayanan kepegawaian	kepuasan pelayanan kepegawaian	40 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Kinerja	:	Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya satya	Orang	155	161	104%
					Input	:	dana yang tersedia	Rp.	58.235.600,00	57.224.600,00	98,26%
					Output	:	Jumlah Pegawai Yang Menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Orang	155	161	104%
					Outcome	:	Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Orang	155	161	104%

B.2 Capaian Kinerja Utama/ Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengukur peningkatan dan capaian kinerja serta meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari program/ kegiatan yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuisa Kabupaten Kampar.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Pengukuran Indikator Kinerja Utama TA. 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sipil Negara	%ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	± 2% dari jumlah ASN Kabupaten Kampar	2% dari jumlah ASN Kabupaten Kampar (204 orang)
	Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang terlayani	Indeks Kepuasan pelayanan kepegawaian	4 (sangat baik) 100	76,83 (baik)

B.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan,

sehingga diketahuilah realisasi porsentase fisik dan keuangan dari kegiatan yang telah direncanakan untuk kemudian dilakukan analisa dan evaluasi.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 ada 2 misi, 3 sasaran dengan 40 indikator kinerja yang telah ditetapkan guna pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, dan pada Tahun Anggaran 2019 ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar didukung oleh 9 (sembilan) Program dan 40 Kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Untuk mewujudkan sasaran 2 dari Misi I Tahun 2019 ditetapkan 35 Kegiatan dalam 9 Program sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel. 3.3

Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran 1 (Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur Sipil Negara) Misi I.

Program	Kegiatan		Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	% Capaian
Program Peningkatan kapsitas Sumber Daya Aparatur	19	Pendidikan dan Pelatihan Formal	71.412.700	67.812.700	94,96%
	20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.500.000	19.105.240	97,98%
Program Pendidikan Kedinasan	25	Peningkatan SDM Aparatur Dalam Ikatan Dinas	739.983.100	366.131.311	49,48%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS daerah	1.101.911.800	943.655.900	85,64%
Program Pembinan dan Pengembangan Aparatur	28	Penyusunan Rencana pembinaan karir PNS	294.129.000	282.733.000	96,13%
	32	Penyelanggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Bagi PNS Kab. Kampar	113.173.900	89.403.900	79,00%
Jumlah			2.340.110.500	1.768.842.051,00	83,22%

Tabel. 3.4

Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran 2 (meningkatkan Pelayanan kepegawaian) Misi I.

Program	Kegiatan		Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	% Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	155.400.000	110.730.886	71,26%
	2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	69.135.502	64.799.250	93,73%
	3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	36.994.000	35.494.000	95,95%
	4	Penyediaan Alat Tulis kantor	66.526.098	66.375.360	99,77%
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.473.110	45.427.425	99,90%
	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.436.930	5.426.000	99,80%
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.000.000	154.722.000	93,77%
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan permundang-undangan	3.960.000	3.960.000	100,00%
	9	Penyediaan makanan dan minuman	146.882.000	107.270.226	73,03%
	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	620.900.000	510.023.021	82,14%
	11	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	104.610.000	92.365.000	88,29%
	12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	65.700.000	65.700.000	100,00%
Program Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur	13	Pembangunan Gedung Kantor	90.000.000	89.815.000	99,79%
	14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	465.000.000	431.000.000	92,69%
	15	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51.992.000	45.409.900	87,34%
	16	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	232.060.000	222.540.000	
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	17	Pemindahan Tugas PNS	45.645.200	43.278.700	94,82%
	18	Proses Pengusulan Pensiun	38.536.500	35.359.200	91,76%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.549.000	1.549.000	100,00%
	20	Penyususnan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.586.400	1.586.400	100,00%
	21	Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	29.074.600	28.924.600	99,48%
Program Penyelenggaraan Agenda Pemerintah	22	Konsolidasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah	45.980.300	45.980.300	100,00%
	23	Pembinaan Jiwa Korsa dan Penyelenggaraan Persemayaman / Pemakaman bagi Anggota Korpri	182.101.300	168.001.300	92,26%
	24	Seleksi penerimaan calon PNS	613.700.000	548.122.103	89,31%

	25	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	70.025.600	66.575.600	95,07%
	26	Updating dan Validasi data kepegawaian	98.584.300	95.884.300	97,26%
	27	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Melalui Seleksi Terbuka	451.472.150	338.876.327	75,06%
	28	Sumpah PNS	9.161.350	9.161.350	100,00%
	29	Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian	19.506.750	16.706.750	85,65%
Jumlah			3.931.993.090,00	3.451.063.998,00	83,22%

Untuk merealisasikan sasaran di atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar menggunakan dana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2019 sebesar Rp. 5.219.906.049,00 atau 83,22 % dari target anggaran sebesar Rp. 6.272.103.590,00. Sedangkan tingkat pencapaian porsentase fisik total 103,74%.

Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran 3 dari Misi I Tahun 2019 direalisasikan dengan 4 kegiatan dalam 1 program sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel. 3.5
Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran 2 Misi I.

Program	Kegiatan		Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	% Capaian
Program Pembinan dan Pengembangan Aparatur	36	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	747.471.152	738.368.252	98,78%
	37	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah	10.477.900	9.000.000	85,90%
	38	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan Struktural	40.687.850	40.687.850	100,00%
	39	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan Fungsional	40.913.200	40.913.200	100,00%
Jumlah			839.550.102,00	828.969.302,00	98,74%

Untuk merealisasikan sasaran di atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar menggunakan dana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2018 sebesar Rp. 828.969.302,00,- atau 98,74% dari target anggaran sebesar Rp. 839.550.102,00, Sedangkan tingkat pencapaian porsentase fisik 101,76%.

Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran 1 dari Misi VI RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2019 ditetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.11. berikut :

Tabel. 3.6

Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran 2 Misi I.

Program	Kegiatan		Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	% Capaian
Program Pembinan dan Pengembangan Aparatur	40	Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	58.235.600	57.224.600	98,26%
Jumlah			58.235.600,00	57.224.600,00	98,26%

Untuk merealisasikan sasaran di atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Kampar menggunakan dana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2019 sebesar Rp. 57.224.600,00 atau 98,26% dari target anggaran sebesar Rp. 58.235.600,00.

C. ANALISA KEUANGAN

Target kinerja belanja terutama terkait dengan pelaksanaan pembangunan khususnya yang dilaksanakan Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar, yaitu berupa program dan kegiatan pembangunan yang merupakan urusan pemerintahan umum. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilihat dari aspek efektifitas dan efisiensinya sebagaimana telah diuraikan dalam evaluasi kinerja kegiatan.

Melalui tabel 3.12 dapat dilihat ikhtisar realisasi target kinerja belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Kampar Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Ikhtisar Laporan Realisasi Keuangan BKPSDM Kab. Kampar Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	BELANJA			
1.	Belanja Operasi	16.622.252.924,00	9.100.405.963,00	54,75%
2.	Belanja Modal	865.060.000,00	811.262.000,00	93,78%
	Jumlah Belanja	17.487.312.924,00	9.911.667.963,00	56,68%

Secara keseluruhan realisasi belanja sebesar Rp **9.911.667.963,00** atau **56,68%** dari rencana anggaran belanja sebesar Rp. **17.487.312.924,00**. Berikut ini rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.7.1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2019 BKPSDM Kab. Kampar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
2.	**BELANJA**	**17.487.312.924,00**	**9.911.667.963,00**	**56,68%**
2.1.	**BELANJA OPERASI**	**16.622.252.924,00**	**9.100.405.963,00**	**54,75%**
2.1.1.	**Belanja Pegawai**	**10.317.423.632,00**	**3.805.568.012,00**	**36,88%**
2.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.004.935.632,00	2.666.500.012,00	**29,61%**
2.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.312.488.000,00	1.139.068.000,00	**86,79%**
2.1.2.	**Belaanja Barang dan Jasa**	**6.304.829.292,00**	**5.294.837.951,00**	**83,98%**
2.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.987.982,00	166.683.062,00	**97,48%**
2.1.2.02	Belanja Bahan/Material	210.500,00	210.000,00	**99,76%**
2.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	162.160.000,00	117.490.886,00	**72,45%**
2.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.992.000,00	45.409.900,00	**87,34%**
2.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.163.310,00	114.523.875,00	**90,77%**
2.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	324.750.000,00	308.447.500,00	**94,98%**
2.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	76.680.000,00	56.919.500,00	**74,23%**
2.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	21.242.500,00	16.642.500,00	**78,35%**
2.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	455.227.000,00	410.600.826,00	**90,20%**
2.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	**100,00%**
2.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.094.250.000,00	1.805.047.662,00	**86,19%**
2.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	36.994.000,00	35.494.000,00	**95,95%**
2.1.2.19	Belanja Jasa Konsultasi	90.000.000,00	89.815.000,00	**99,79%**
2.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	550.000.000,00	229.006.000,00	**41,64%**
2.1.2.23	Belanja Kursus, pelaatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	282.123.000,00	232.263.240,00	**82,33%**
2.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	551.950.000,00	422.800.000,00	**76,60%**
2.1.2.25	Honorarium PNS	58.750.000,00	30.700.000,00	**52,26%**
2.1.2.26	Honorarium Non PNS	1.243.349.000,00	1.204.784.000,00	**96,90%**
2.2	**BELANJA MODAL**	**865.060.000,00**	**811.262.000,00**	**93,78%**
2.2.2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**633.000.000,00**	**588.722.000,00**	**93,01%**
2.2.2.04	Belanja Modal Pengadaaan alat angkutan darat bermotor	465.000.000,00	431.000.000,00	**92,69%**
2.2.2.15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.000.000,00	21.100.000,00	**87,92%**

2.2.2.16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	109.000.000,00	103.270.500,00	**94,74%**
2.2.2.17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.000.000,00	23.501.500,00	**94,01%**
2.2.2.18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	9.850.000,00	**98,50%**
2.2.2.19	**Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**232.060.000,00**	**222.540.000,00**	**95,90%**
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.060.000,00	222.540.000,00	**95,90%**
2.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	232.060.000,00	222.540.000,00	**95,90%**

Tabel 3.7.2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2019 BKPSDM Kab. Kampar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
5.	**BELANJA DAERAH**	**17.487.312.924,00**	**9.911.667.963,00**	**56,68%**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**10.317.423.632,00**	**3.805.568.012,00**	**36,88%**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**10.317.423.632,00**	**3.805.568.012,00**	**36,88%**
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	9.004.935.632,00	2.666.500.012,00	**29,61%**
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.312.488.000,00	1.139.068.000,00	**86,79%**
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**7.169.889.292,00**	**6.106.099.951,00**	**85,16%**
5.2.1	**Belanja Pegawai**	**58.750.000,00**	**30.700.000,00**	**52,26%**
5.2.1.01	Honorarium PNS	58.750.000,00	30.700.000,00	**52,26%**
5.2.2	**Belaanja Barang dan Jasa**	**6.246.079.292,00**	**5.264.137.951,00**	**84,28%**
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.987.982,00	166.683.062,00	**97,48%**
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	210.500,00	210.000,00	**99,76%**
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	507.359.000,00	439.424.886,00	**86,61%**
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.992.000,00	45.409.900,00	**87,34%**
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.163.310,00	114.523.875,00	**90,77%**
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	324.750.000,00	308.447.500,00	**94,98%**
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	76.680.000,00	56.919.500,00	**74,23%**
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	21.242.500,00	16.642.500,00	**78,35%**
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	455.227.000,00	410.600.826,00	**90,20%**
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	**100,00%**
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.094.250.000,00	1.805.047.662,00	**86,19%**
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	550.000.000,00	229.006.000,00	**41,64%**
5.2.2.17	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	282.123.000,00	232.263.240,00	**82,33%**

5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.994.000,00	35.494.000,00	**95,95%**
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	90.000.000,00	89.815.000,00	**99,79%**
5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsumber	551.950.000,00	422.800.000,00	**76,60%**
5.2.2.32	Honorarium Jasa Tim Teknis	898.150.000,00	882.850.000,00	**98,30%**
5.2.3	**BELANJA MODAL**	**865.060.000,00**	**811.262.000,00**	**93,78%**
2.2.2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**865.060.000,00**	**811.262.000,00**	**93,78%**
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaaan alat angkutan darat bermotor	465.000.000,00	431.000.000,00	**92,69%**
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	24.000.000,00	21.100.000,00	**87,92%**
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	-	**0,00%**
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	109.000.000,00	103.270.500,00	**94,74%**
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.000.000,00	23.501.500,00	**94,01%**
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	9.850.000,00	**98,50%**
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian)* Bangunan	232.060.000,00	222.540.000,00	**95,90%**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar telah dapat mengoptimalkan penggunaan dana Tahun 2019, realisasi belanja langsung (belanja pegwai + belanja barang dan jasa + belanja modal) sebesar Rp. 6.106.099.951,00 atau 85,16% dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.169.889.292,00 sehingga terdapat efisensi anggaran sebesar Rp. 1.063.789.341,00 atau 14,84%, sedangkan uang yang telah disetor pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 221.666.586,00 merupakan UYHD Tahun 2019.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil paparan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Kampar Tahun 2019 sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab I sampai dengan Bab III di atas maka pada Bab IV ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian fisik kegiatan 99,68%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 85,16%. Ini berarti bahwa semua kegiatan yang telah ditetapkan/direncanakan belum dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya dalam pengumpulan data-data dan koordinasi internal sehingga berakibat pada kurang akuratnya dalam penetapan indikator dan sasaran kinerja terutama jangka menengah dan panjang.
2. Kurang disiplin dalam penggunaan anggaran terutama terutama ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.
3. Masih terdapat kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program oleh Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM).

Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh BKPSDM baik segi kualitas dan kuantitas masih menjadi hambatan pada proses percepatan hasil kerja.

2. Respon Koordinasi Instansi lain masih rendah.

   Selaku instansi yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan manajeman pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar membutuhkan pasrtisipasi aktif dari instansi lain dalam pelaksanaan program-program kerja terutama yang berkaitan dengan informasi data kepegawaian di masing-masing instansi.

3. Masalah sarana dan prasarana.

   Sarana dan prasarana yang dimiliki BKSPDM Kabupaten Kampar saat ini masih kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.

Selanjutnya sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Kampar Tahun 2019 maka dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah untuk kemudian dijadikan sebagai masukan atau bahan evaluasi dimasa yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam perencanaan terutama untuk mengantisipasi tuntutan para Pegawai Negeri Sipil dalam hal pelaksanaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.
2. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap penetapan indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.

3. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
4. Lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
5. Lebih meningkatkan disiplin para PNS sebagai Aparatur Sipil Negara agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada PNS Kabupaten Kampar khususnya dan masyarakat umumnya.

Demikianlah Laporan Kinerja Insatnsi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar ini dibuat dan disampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai catatan dalam mengambil kebijakan strategis untuk masa yang akan datang.

Bangkinang, Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAMPAR

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ZULFAHMI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199203 1 008